



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP )



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

## DINAS SOSIAL



**Dinas Sosial  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu  
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan  
Pangkalpinang

Telp. (0717) 439080, 439082

Fax. (0717) 439098

Website: [www.dinkesos.babelprov.go.id](http://www.dinkesos.babelprov.go.id)

e-mail: [dinkesosbabel@yahoo.co.id](mailto:dinkesosbabel@yahoo.co.id)



## TAHUN ANGGARAN 2019





## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sistem manajemen strategi yang prosesnya dimulai dari penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai serta ditetapkan dalam suatu Rencana Strategis Jangka Menengah Organisasi. Rencana strategis tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan ditetapkan komitmennya dalam Penetapan Kinerja (PK). Selama tahun berjalan dilakukan pengumpulan data dan pengukuran serta evaluasi atas kinerja untuk selanjutnya dilaporkan dalam Laporan Kinerja.

Keluaran utama dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memuat informasi penting dan relevan bagi pengguna laporan, yaitu unsur pimpinan eksekutif, unsur pengawasan dan perencanaan.

Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 merupakan implementasi sistem akuntabilitas berupa pertanggungjawaban kinerja Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat.

Pertanggungjawaban ini tidak hanya dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, maupun upaya pemecahan permasalahan pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan juga untuk meningkatkan



efisiensi, efektifitas, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.

Laporan ini memuat tingkat capaian dan realisasi anggaran dari sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam tahun berjalan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

Pengukuran pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan membandingkan antara rencana yang diinginkan (*Performance Plan*) dengan realisasi kinerja (*Performance Result*) yang dicapai. Hasil pengukuran ini tentang pelaksanaan program dan kegiatan dengan guna memberikan gambaran dan bermanfaat untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak internal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaannya yang selaras dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022.

Disisi lain pengukuran kinerja tersebut berguna juga bagi pembelajaran SKPD untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik di tahun berikutnya. Di pihak eksternal bahwa adanya masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku pengawas jalan roda pemerintahan dan pengukuran kinerja serta bermanfaat bagi roda pemerintahan dan pengukuran kinerja secara transparan dan akuntabel.

Pada tahun 2019, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian tujuan dilakukan terhadap 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan untuk pencapaian realisasi terhadap target yang masuk pada kategori sangat berhasil yaitu : Dari 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan



pencapaian realisasi terhadap target banyaknya bantuan yang disampaikan atau diterima masyarakat masuk pada kategori "*Sangat Berhasil*" atau 100,20 %.

Dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan dalam menghadapi kendala/hambatan dalam mencapai sasaran strategis adalah melakukan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan bidang teknis pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sasaran strategis yang telah masuk kategori sangat berhasil dan berhasil, maka untuk selanjutnya diupayakan agar tetap dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan capaian kinerjanya.



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **I.1. LATAR BELAKANG**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah Provinsi/ Kab/Kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

Dalam pelayanan di bidang kesejahteraan sosial berdasarkan Undang-Undang No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mengamanatkan agar pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, serta melakukan penanggulangan kemiskinan.

Sesuai dengan arah kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial, perlu dilakukan usaha penekanan dan penurunan pada populasi penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS), yang diprioritaskan pada upaya-upaya antara lain :

1. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
2. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial;

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS SOSIAL**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**





## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### II.1 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang akan diwujudkan pada periode 2017-2022 adalah ***“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”***. Pernyataan visi ini mengandung lima makna yaitu:

1. *Provinsi Kepulauan Bangka Belitung* adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 yang didalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.
2. *Sejahtera* menunjukkan bahwa masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan tingkat pendapatan masyarakatnya meningkat dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat mengecil.
3. *Maju* adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan ketatapemerintahan yang baik (*good governance*).
4. *Unggul* dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **III.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

##### **III.1.1. PENGUKURAN KINERJA**

Akuntabilitas kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari perencanaan strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK). Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pun tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri, fungsi aktuating dari berbagai perencanaan yang sudah dibuat tersebut, sehingga sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengarahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurnya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program dan sasaran yang sejauh mana kegiatan, program dan sasaran tersebut sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat.

Pengukuran kinerja merupakan penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kesejahteraan sosial yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap



## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Berdasarkan uraian pada bab – bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019, yaitu :

1. Pada tahun 2019, kinerja Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat melalui pengukuran, evaluasi dan analisis capaian tujuan diukur melalui 3 (tiga) sasaran strategis mencakup masing – masing bidang capaian beserta berbagai programnya.
2. Dari 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan pencapaian realisasi terhadap target banyaknya bantuan yang disampaikan atau diterima masyarakat masuk pada kategori berhasil dengan masing-masing sasaran  $\geq 100 \%$ .
3. Secara umum pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2019, capaian rata-rata dari ke-3 (tiga) sasaran tersebut dikategorikan “*Sangat Berhasil*” atau 100,20 %.
4. Walaupun dari kelima sasaran strategis dikategorikan berhasil namun masih ada beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran strategis, yaitu :
  - a. Kendala utama yang terjadi adalah karena adanya rasionalisasi pagu anggaran, baik karena efisiensi (pengurangan) rasionalisasi pagu anggaran, maupun terkena penundaan (penghapusan) rasionalisasi kegiatan sehingga berimbas pada pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan;
  - b. Proses perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya memperhatikan hubungan erat antara kemampuan pembiayaan perangkat daerah dan penerimaan/pendapatan

pemerintah daerah, hal ini berpengaruh kepada konsistensi dan kontinuitas program dan kegiatan pada organisasi perangkat daerah sebagaimana yang sudah dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

- c. Belum optimalnya sinergitas perencanaan dan penganggaran baik pada level pusat-provinsi, provinsi-kabupaten, lintas sektor maupun lintas program/bidang, hal ini menyebabkan pelayanan dan penanganan masalah menjadi kurang maksimal baik efektifitas dan juga pemanfaatannya;
- d. Tidak tersalurkan secara langsung bantuan kepada keluarga miskin masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena mata pencaharian masyarakat yang bidang usahanya musiman atau bekerja dengan orang lain (sebagai buruh) sehingga tidak memungkinkan untuk dibantu dan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lokasi yang terdata cenderung berubah-ubah sehingga kadang terjadi pergeseran antara data dengan kondisi real di masyarakat;
- e. Kesulitan dalam pengolahan data penerima manfaat ke dalam RKA dalam bentuk *by name by address by need*. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah karena proses penanganan PMKS harus dilakukan sesuai standar atau petunjuk pelaksanaan;
- f. Dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan masih banyak kendala yang di hadapi terutama indikator-indikator kinerja kegiatan yang ingin di capai bukan dalam bentuk orang tetapi jumlah daerah yaitu 7 Kabupaten/kota;
- g. Upaya yang dilaksanakan dalam menghadapi kendala/hambatan dalam mencapai sasaran strategis adalah melakukan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi dan harmonisasi



dengan bidang teknis pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sasaran strategis yang telah masuk kategori sangat berhasil, maka untuk selanjutnya diupayakan agar tetap dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan capaian kinerjanya.

Pangkalpinang, Januari 2020

Kepala Dinas Sosial  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



M. AZIZ HARAHAD, SH.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640712 198503 1 012

**PENETAPAN KINERJA  
DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2019**

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NAMA OPD : DINAS SOSIAL

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                               | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                    | SATUAN | TARGET | CAPAIAN | PROGRAM/ KEGIATAN                                                                    | ANGGARAN    | CAPAIAN ANGGARAN |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 1  | 2                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5      | 6       | 7                                                                                    | 8           | 9                |
| 1  | Meningkatnya Bantuan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Beras Sejahtera<br>Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan Usaha<br>Persentase Debitur yang membayar tunggakan kredit usaha peningkatan ekonomi masyarakat | kube   | 210    | 210     | 1 Program Penanganan Fakir Miskin                                                    | 408.200.000 | 294.271.700      |
|    | 1                                                                               | Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pendampingan UEP KUBE                                                                                                                             | kube   | 210    | 210     | 1 Stimulan Penguatan Ekonomi Keluarga Fakir Miskin di Wilayah Pedesaan               | 142.000.000 | 110.241.700      |
|    | 2                                                                               | Jumlah Rastra dan BPNT kepada keluarga Miskin                                                                                                                                                        | KK     | 43.458 | 43.458  | 2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Terhadap Bantuan Rastra BPNT Kepada Keluarga Miskin | 66.970.000  |                  |
|    | 3                                                                               | Jumlah Keluarga Miskin dan rentan yang mendapatkan pendampingan UEP KUBE                                                                                                                             | kube   | 210    | 210     | 3 Stimulan Penguatan Sosial Ekonomi Keluarga Miskin dan Rentan                       | 166.920.000 | 151.920.000      |
|    | 4                                                                               | Jumlah Dukungan terhadap peningkatan kualitas program Pusat                                                                                                                                          | kube   | 20     | 20      | 4 Peningkatan Kualitas Dukungan Program Pusat                                        | 32.310.000  | 32.110.000       |
|    |                                                                                 | Persentase PMKS/PSKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial                                                                                                                                |        |        |         | 2 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                                            | 488.940.000 | 273.823.246      |
|    | 1                                                                               | Jumlah pekerja sektor informal/ mandiri dan keluarga miskin penerima PKH yang memperoleh jaminan sosial                                                                                              | orang  | 1.445  | 1.700   | 1 Penguatan Akses Jaminan Sosial Keluarga                                            | 358.450.000 | 225.750.000      |
|    |                                                                                 | Jumlah keluarga miskin penerima santunan kematian                                                                                                                                                    | orang  | 55     | -       |                                                                                      |             |                  |
|    | 2                                                                               | Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan pendampingan program PKH                                                                                                                                     | orang  | 45.000 | 45.000  | 2 Penguatan Jaminan Sosial Keluarga PKH                                              | 130.490.000 | 48.073.246       |



| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SATUAN                                     | TARGET                | CAPAIAN               | PROGRAM/ KEGIATAN                                                                                    | ANGGARAN                   | CAPAIAN ANGGARAN           |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                          | 5                     | 6                     | 7                                                                                                    | 8                          | 9                          |
|    |                   | Persentase korban napza<br>Persentase PMKS yang<br>mendapatkan pelayanan,<br>perlindungan dan<br>rehabilitasi sosial<br>Persentase Perempuan<br>korban kekerasan yang<br>mendapatkan pelayanan,<br>perlindungan dan<br>rehabilitasi sosial<br>Persentase anak yang<br>mendapatkan hak dalam<br>pelayanan, perlindungan<br>dan rehabilitasi sosial |                                            |                       |                       | 3 Program Rehabilitasi Sosial                                                                        | 1.111.678.000              | 924.093.538                |
|    | 1                 | Jumlah Lanjut Usia yang<br>mendapatkan pelayanan,<br>Rehabilitasi dan Perlindungan<br>2 Jumlah anak yang direhabilitasi<br>dan memperoleh perlindungan<br>sosial                                                                                                                                                                                  | orang<br>orang kader<br>pendamping<br>anak | 358<br>3<br>10<br>270 | 358<br>3<br>10<br>355 | 1 Pelayanan dan Rehabilitasi<br>Sosial Lanjut Usia<br>2 Rehabilitasi dan Perlindungan<br>Sosial Anak | 234.014.000<br>205.020.000 | 220.888.200<br>150.943.008 |
|    | 3                 | Jumlah masyarakat dan korban<br>napza yang mendapatkan<br>pembinaan penyalahgunaan<br>napza                                                                                                                                                                                                                                                       | orang                                      | 200                   | 200                   | 3 Pembinaan Sosial Korban<br>Penyalahgunaan NAPZA                                                    | 201.190.000                | 177.907.050                |
|    | 4                 | Jumlah Penyandang Disabilitas<br>yang Mendapatkan<br>Perlindungan, Rehabilitasi dan<br>Pelayanan Sosial dan<br>Meningkatnya Kinerja dan Peran<br>serta Yayasan/ Lembaga<br>Kesejahteraan Sosial/ Kader/<br>dan PSKS dalam Memberikan<br>Pelayanan dan Pendampingan<br>kepada Penyandang Disabilitas                                               | orang                                      | 100                   | 100                   | 4 Pelayanan dan Rehabilitasi<br>Sosial bagi Penyandang<br>Disabilitas                                | 219.450.000                | 211.529.900                |
|    | 5                 | Jumlah tuna sosial yang<br>mendapatkan pembinaan sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                           | orang                                      | 140                   | 351                   | 5 Pembinaan Sosial Tuna Sosial                                                                       | 139.515.000                | 94.365.880                 |
|    | 6                 | Jumlah bayi dan anak yang<br>mendapat pertimbangan<br>perzinahan untuk di adopsi                                                                                                                                                                                                                                                                  | orang                                      | 5                     | 9                     | 6 Pertimbangan Perzinahan<br>Pengangkatan Anak atau Tim<br>PIPA                                      | 19.690.000                 | 12.990.500                 |
|    | 7                 | Jumlah anak yang mendapat<br>pendampingan dan advokasi<br>apabila berhadapan dengan<br>hukum                                                                                                                                                                                                                                                      | orang                                      | 10                    | 10                    | 7 Pendampingan dan Advokasi<br>Sosial Klien bagi Anak<br>Berhadapan dengan Hukum                     | 12.549.000                 | 10.485.000                 |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                        | SATUAN       | TARGET   | CAPAIAN  | PROGRAM/ KEGIATAN                                                                    | ANGGARAN             | CAPAIAN ANGGARAN     |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                        | 4            | 5        | 6        | 7                                                                                    | 8                    | 9                    |
|    | 8                 | Meningkatnya Kinerja da Peran Serta KOMDA Lansia Kabupaten/Kota dalam                                                                    | komda lansia | 8<br>470 | 3<br>150 | 8 Optimalisasi Kinerja Komda Lansia                                                  | 80.250.000           | 44.984.000           |
|    |                   | <b>Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Pelayanan Teknis Panti Sosial</b>          |              |          |          | <b>4 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Panti Sosial</b>                           | <b>1.122.060.000</b> | <b>1.055.998.826</b> |
|    | 1                 | Jumlah klien/warga binaan sosial yang mendapatkan pelayanan psikososial                                                                  | orang        | 50       | 50       | 1 Pelayanan Psikososial bagi PMKS dipanti Sosial Bina Serumpun                       | 562.400.000          | 508.729.000          |
|    | 2                 | Jumlah sarana/prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial yang disediakan                                                                | paket        | 10       | 10       | 2 Peningkatan kualitas pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kessos bagi PMKS | 220.640.000          | 210.676.610          |
|    | 3                 | Jumlah warga binaan sosial yang memperoleh pelatihan dan keterampilan kerja                                                              | orang        | 20       | 20       | 3 Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Warga Binaan Sosial di PSBS        | 29.200.000           | 29.097.000           |
|    | 4                 | Jumlah klien yang dapat diadvokasi dan dipulangkan                                                                                       | orang        | 20       | 20       | 4 Advokasi dan Pemulangan Klien/Warga Binaan Sosial                                  | 65.000.000           | 64.973.200           |
|    | 5                 | Jumlah Prasarana Panti yang di rehabilitasi                                                                                              | Tahun        | 1        | 1        | 5 Rehabilitasi Ringan Sarana Prasarana Panti                                         | 100.000.000          | 99.896.746           |
|    | 6                 | Jumlah Sarana dan Prasarana panti yang dibangun                                                                                          | paket        | 1        | 1        | 6 Pembangunan Prasarana Panti                                                        | 144.820.000          | 142.626.270          |
|    |                   | <b>Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Penguatan Penyelenggaraan Panti Sosial</b> |              |          |          | <b>5 Program Penguatan Penyelenggaraan Panti Sosial</b>                              | <b>1.440.820.000</b> | <b>1.146.024.290</b> |
|    | 1                 | Jumlah klien yang memperoleh pendampingan dan pembinaan lanjutan                                                                         | orang        | 10       | 10       | 1 Pendampingan dan Pembinaan Lanjutan Klien                                          | 36.250.000           | 35.871.000           |
|    | 2                 | Jumlah penghuni panti yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan                                                             | orang        | 20       | 18       | 2 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Penghuni Panti                          | 83.500.000           | 44.556.200           |
|    | 3                 | Jumlah pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar yang disediakan bagi penghuni panti                                                       | orang        | 20       | 15       | 3 Pengelolaan Fungsi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti                   | 734.780.000          | 649.973.500          |
|    | 4                 | Jumlah eks penghuni panti yang menerima bantuan UEP                                                                                      | orang        | 4        | 4        | 4 Penyediaan Bantuan UEP bagi eks Penghuni Panti                                     | 39.125.000           | 38.325.000           |
|    | 5                 | Jumlah sarana penunjang yang disediakan dalam Panti                                                                                      | tahun        | 1        | 1        | 5 Penyediaan dan Dukungan Sarana Penunjang Panti                                     | 501.890.000          | 335.390.390          |



| NO | SASARAN STRATEGIS                                                       | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                         | SATUAN          | TARGET | CAPAIAN | PROGRAM/ KEGIATAN                                               | ANGGARAN    | CAPAIAN ANGGARAN |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 1  | 2                                                                       | 3                                                                                                                                                         | 4               | 5      | 6       | 7                                                               | 8           | 9                |
|    | 6                                                                       | Jumlah Pengelola Panti yang memperoleh pengetahuan dan keterampilan                                                                                       | orang           | 16     | 16      | 6 Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Pengelola Panti        | 45.275.000  | 41.908.200       |
| 2  | Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) | Persentase PMKS/PSKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial                                                                                                 |                 |        |         | 1 Program Pemberdayaan Sosial                                   | 823.950.000 | 788.944.191      |
|    | 1                                                                       | Jumlah Klien yang ditangani melalui LK3                                                                                                                   | orang           | 75     | 75      | 1 Pemberdayaan Keluarga                                         | 78.715.000  | 76.815.100       |
|    | 2                                                                       | Jumlah kelompok sasaran dan lokasi yang dapat dijangkau dan diberikan penyuluhan sosial                                                                   | orang           | 275    | 275     | 2 Penyuluhan Sosial                                             | 80.950.000  | 77.650.000       |
|    | 3                                                                       | Jumlah dunia usaha/lembaga/ masyarakat yang menyelenggarakan Pengumpulan Uang/Barang dan Undian Gratis Berhadiah sesuai aturan berlaku                    | lembaga         | 30     | 30      | 3 Asistensi dan Advokasi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial | 19.390.000  | 19.150.000       |
|    | 4                                                                       | Jumlah pilar-pilar Sosial yang diberdayakan                                                                                                               | orang           | 100    | 100     | 4 Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat                    | 105.575.000 | 86.476.000       |
|    | 5                                                                       | Jumlah Sarana dan Prasarana TMP yang dapat dipelihara dan disediakan<br>Jumlah Veteran dan Janda Pahlawan yang Mampu melaksanakan Peran dan Fungsi Sosial | TMP<br>kegiatan | 1<br>4 | 1<br>4  | 5 Peningkatan Pelayanan dan Kesejahteraan Keluarga Pionir       | 539.320.000 | 528.853.091      |

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                         | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                             | SATUAN                          | TARGET               | CAPAIAN              | PROGRAM/ KEGIATAN                         | ANGGARAN    | CAPAIAN ANGGARAN |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------|------------------|
| 1  | 2                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                               | 5                    | 6                    | 7                                         | 8           | 9                |
| 3  | Meningkatnya korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial | Persentase PMKS/PSKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial                                                                                                                                                                                                         |                                 |                      |                      | 1 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | 699.350.000 | 547.058.900      |
|    | 1                                                                         | Jumlah desa/kelurahan rawan bencana alam yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial<br>Jumlah korban bencana alam yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial<br>Jumlah korban bencana alam yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial                             | kab/kota<br><br>KK              | 7<br><br>-           | 7<br><br>10          | 1 Pengelolaan Posko Kebencanaan Alam      | 502.400.000 | 470.400.000      |
|    |                                                                           | Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas berkaitan dengan Kesiapsiagaan bencana alam                                                                                                                                                                                | orang                           | 16                   | 14                   |                                           |             |                  |
|    | 2                                                                         | Jumlah desa/kelurahan rawan bencana sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial<br>Jumlah korban bencana sosial yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial<br>Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas berkaitan dengan Kesiapsiagaan bencana sosial | kab/kota<br><br>KK<br><br>orang | 7<br><br>-<br><br>15 | 7<br><br>9<br><br>15 | 2 Pengelolaan Posko Kebencanaan Sosial    | 196.950.000 | 76.658.900       |